

BAB IV

KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menjalankan berbagai upaya diplomasi dalam rangka mengatasi dampak dari implementasi kebijakan RED dan RED II terhadap ekspor CPO Indonesia. Upaya diplomasi tersebut merupakan bentuk diplomasi ekonomi dan diplomasi publik yang dilaksanakan sejalan dengan dampak yang ditimbulkan berupa hambatan perdagangan pada akses pasar serta citra buruk terhadap komoditas CPO. Diplomasi ekonomi dan diplomasi publik Indonesia juga dijalankan melalui berbagai kanal, dan dengan melibatkan berbagai aktor eksternal dalam kegiatan seperti negosiasi, kerja sama, promosi perdagangan, dan advokasi. Sebagai respon terhadap kedua kebijakan tersebut juga, pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa upaya konkret yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap CPO yang berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan dan mewajibkan sertifikasi.

Upaya diplomasi ekonomi yang dijalankan sendiri selain bertujuan untuk memperkuat akses pasar seperti salah satunya melalui mekanisme WTO, juga ditujukan untuk mengatasi masalah diskriminasi dan kecenderungan proteksionisme yang terbentuk akibat kebijakan RED dan RED II. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, diplomasi ekonomi Indonesia berupaya dalam mendorong perdagangan yang adil, meningkatkan penerimaan pasar, dan daya saing komoditas CPO Indonesia untuk dapat mempertahankan ekspor. Oleh karena itu, secara keseluruhan, diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak kebijakan RED ini merupakan bentuk aktivitas penguatan pasar tradisional. Kondisi ini sejalan dengan Uni Eropa yang merupakan pasar utama dari ekspor komoditas CPO Indonesia.

Diplomasi publik Indonesia juga ditujukan untuk mengatasi dampak kebijakan RED dan RED II berupa citra buruk CPO. Diplomasi publik Indonesia juga dapat dilihat bertujuan untuk mengatasi masalah berupa kampanye negatif

yang ditunjukkan melalui poin-poin dalam *counter narrative* mengenai keunggulan dari komoditas CPO Indonesia untuk menyanggah klaim dari kebijakan RED. Selain itu, diplomasi publik Indonesia juga bertujuan untuk merubah persepsi negatif publik terhadap CPO. Upaya ini dapat dilihat dari diseminasi informasi oleh pemerintah Indonesia lewat narasi dan advokasi mengenai pengelolaan dan kemajuan Indonesia dalam mengembangkan sawit yang berkelanjutan, serta berbagai kontribusi positif CPO dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

